ANALISIS FINANSIAL INKLUSI TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020)

SKRIPSI

YUSRIDA
NIM. 1705906010068

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021

ANALISIS FINANSIAL INKLUSI TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT
(Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

YUSRIDA
NIM. 1705906010068

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
MEULABOH – ACEH BARAT
Website: www.utu.ac.id, email: fekonutu@yahoo.co.id Telp (0655) 7023552

Meulaboh, 31 Desember 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : S1 (Strata 1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **YUSRIDA**
NIM : 1705906010068

Dengan judul : **Analisis Finansial Inklusi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Mahrizal, SE., M.Si
NIDN. 0118117102

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. T. Zulham, SE., M. Si
NIP. 19600212 198903 1 003

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si
NI PPPK. 19741105 202121 1 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
MEULABOH – ACEH BARAT
Website: www.utu.ac.id, email: fekonutu@yahoo.co.id Telp (0655) 7023552

Meulaboh, 31 Desember 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : S1 (Strata 1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **YUSRIDA**
NIM : 1705906010068

Dengan judul : **Analisis Finansial Inklusi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 7 Desember 2021

Menyetujui
Komisi Ujian

		Tanda Tangan
1. Ketua	: Mahrizal, SE., M.Si	.....
2. Sekretaris	: Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si	.....
3. Anggota	: Leli Putri Ansari, SE., M.Si	.....

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si
NI PPPK. 19741105 202121 1 002

iii

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **YUSRIDA**

Nim : 1705906010068

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesisi, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagiaan atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 3 Januari 2022
Saya yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
10000
15F3AAJX579315812

YUSRIDA
NIM. 1705906010068

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha Mulia, Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (Q.S. Al-Mujadilah:11)

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu....

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu....

Kupersembahkan karya sederhana kepada orang yang terkasihi dan kusayangi kehadapan tercinta Ayahanda ***"Usman BL",*** *Ibunda* ***"Anisah Amin"****, terimakasih yang selalu memberi semangat dan do'a dalam menyelesaikan studi sarjanaku...*

*Untuk Kakandaku Tersayang "****Husaini & Nur Lisma****"....Terimakasih untuk dukungan dan do'anya, serta kepada seluruh Keluarga Besar Tercinta...Terima kasih tiada tara atas do'a, dukungan dan nasehat yang diberikan selama ini.*

Terimakasih yang tak terhingga, kepada dosen pembimbing, Bapak ***Mahrizal, SE., M.Si.,*** *juga ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak* ***Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si,.*** *Sungguh mereka benar-benar telah memberikan bimbingan yang sangat berarti bagiku dari proses hingga selesainya pembuatan skripsi ini.*

Terimakasih kepada Sahabat dan Teman-teman Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi-UTU Meulaboh sepenanggungan yang udah sama-sama dari awal kuliah sampai akhir, gak ada kata maju sendiri, tapi tetap sama-sama walau apapun dan bagaimanapun kita perjuangkan sama-sama.

Wassalam
YUSRIDA, SE

BIODATA

Data pribadi

Nama	: **YUSRIDA**
Tempat/ Tgl Lahir	: Kuta Trieng, 24 April 1998
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Email	: yusrida199804@gmail.com

Data Orang tua

Nama Ayah	: Usman BL
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Anisah Amin
Pekerjaan	: IRT

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN Kuta Trieng	(Tahun 2005 – 2011)
SMP	: SMPN 8 Darul Makmur	(Tahun 2011 – 2014)
SMA	:SMAN 1 Darul Makmur	(Tahun 2014 – 2017)
Perguruan Tinggi	: Universitas Teuku Umar	(Tahun 2017 – 2021)

Pengalaman Organisasi

1. Organisasi UKM Tari Tahun 2018
2. BEM Nusantara Tahun 2018
3. HIMEP Bidang Kesenian Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Finansial Inklusi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020)". Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Selanjutnya shalawat beserta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan serta bimbingan yang tidak ternilai harganya dari semua pihak, Skripsi/tugas akhir ini tidak mungkin dapat saya selesaikan. Karena itu izinkanlah saya mengucapakan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung dalam proses penyelesaiaan skripsi ini. Rasa hormat, penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda, serta keluarga tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Mahrizal, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang

membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Zulham, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
5. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
6. Para Dosen dan Staf akademik Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
7. Sahabat-sahabat di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi yang selalu bersama di saat kuliah dan teman-teman yang telah banyak membantu skripsi yang sederhana ini tetapi mempunyai manfaat.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan pskripsi ini. Semoga allah SWT selalu senantiasa membalas semua kebaikan kita semua, *Amin Ya Rabbal' Alamin*.

Alue Peunyareng, 3 Januari 2022

Penulis

YUSRIDA

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial inclusion mechanism for empowering the poor (Case Study of 2020 Activity Management Unit Financing) in Meureubo District, West Aceh Regency. The method in this study is a qualitative method through a descriptive approach. Informants in this study amounted to 13 people. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the financial inclusion mechanism for empowering the poor (2020 UPK Financing Case Study) in Meureubo District, West Aceh Regency goes through 5 stages, namely the loan application stage, examination, disbursement, monitoring/guidance and repayment. The implications of financial inclusion for community empowerment through the Women's Savings and Loans (SPP) UPK in Meureubo District show a positive movement in value. Most of the poor people who received assistance, have felt the benefits and changes in economic conditions. For those who already have a business, they feel that there is an increase in income, and for those who start a new business, they feel that there is an increase in their economic capacity, although it is not too significant.

Keywords: Financial Inclusion, Empowerment, Poor Community

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme finansial inklusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020) di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme finansial inklusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Kasus Pembiayaan UPK Tahun 2020) di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat melalui 5 tahapan, yaitu tahap pengajuan pinjaman, pemeriksaan, pencairan, monitoring/pembinaan dan pembayaran kembali. Implikasi keuangan inklusi untuk pemberdayaan masyarakat melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK di Kecamatan Meureubo menunjukkan pergerakan nilai yang positif. Sebagian besar masyarakat miskin yang menerima bantuan, telah merasakan manfaat dan perubahan kondisi perekonomian. Bagi yang sebelumnya sudah memiliki usaha, mereka merasakan ada peningkatan pendapatan, dan bagi yang memulai usaha baru, mereka merasakan ada peningkatan kemampuan ekonomi, meskipun tidak terlalu signifikan.

Kata Kunci: Finansial Inklusi, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ..... **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN ..... **iv**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **v**
BIODATA PENULIS ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRACT ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1 Finansial Inklusi 10
2.1.1 Pengertian Finansial Inklusi 10
2.1.2 Visi dan Tujuan Finansial Inklusi 12
2.1.3 Manfaat Finansial Inklusi 13
2.1.4 Strategi Nasional Finansial Inklusi 13
2.1.5 Regulasi Finansial Inklusi 16
2.1.6 Implementasi Strategi Nasional Finansial Inklusi 17
2.2 Konsep Pemberdayaan 18
2.2.1 Tujuan Pemberdayaan 20
2.2.2 Tahapan Pemberdayaan 25
2.3 Kemiskinan 26
2.4 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 33
2.5 Penelitian Terdahulu 35
2.6 Kerangka Pemikiran 40

BAB III METODE PENELITIAN **41**
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 41
3.2 Jenis dan Sumber Data 41
3.3 Tehnik Pengambilan Informan 42
3.4 Metode Pengumpulan Data 43

3.5 Model Analisis Data 43
3.6 Definisi Operasional Variabel 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN..... 47
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 47
4.1.1 Gambaran Wilayah Kecamatan Meureubo..... 47
4.1.2 Batas Wilayah..... 47
4.1.3 Keadaan Penduduk 47
4.1.4 Sejarah Singkat Terbentuknya Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat 49
4.1.5 Strukrur Unit Pengelola Kegiatan (UPK)..... 50
4.2 Hasil Penelitian..... 51
4.2.1 Mekanisme finansial inklusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Kasus Pembiayaan UPK Tahun 2020) di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat 51
4.3 Pembahasan 61

BAB V PENUTUP..... 63
5.1 Kesimpulan..... 63
5.2 Saran 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel : 2.1. Penelitian Terdahulu 35
Tabel : 3.1. Informan Penelitian..... 42
Tabel : 4.1. Jumlah Penduduk dan Rata Pertumbuhan Pertahun di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 48
Tabel : 4.2. Analisis Pinjaman Anggota SPP-UPK Kecamatan Meureubo 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 1.1. Petumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan. 2
Gambar: 1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat 6
Gambar: 2.1. Kerangka Pemikiran. 40
Gambar: 4.1. Strukrur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Meureubo 50
Gambar: 4.2. Mekanisme Finansial Inklusi di UPK Kecamatan Meureubo 53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi UPK
3. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang menguasai industri keuangan Indonesia. Besarnya aset perbankan menunjukkan perbankan merupakan lembaga keuangan yang mampu menarik konsumen lebih banyak dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Masyarakat lebih memilih menyimpan asetnya di perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga (Ummah, dkk., 2015). Isu inklusi keuangan telah berkembang setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Peran institusi keuangan telah berkembang bukan hanya sekedar menjadi lembaga intermediasi keuangan namun juga berperan untuk mendukung pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi serta pencapaian stabilitas sistem keuangan (Yaqin, 2019).

Perkembangan inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap perekonomian suatu negara, selain sebagai faktor pendukung dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan, mengurangi kemiskinan, penganngguran serta ketimpangan pendapatan masyarakat (Okoye, dkk., 2017).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai pertumbuhan yang berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menurut Biro Anggaran dan Pelaksanaan APBN dengan memperhitungkan

pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan,dimana hingga tahun 2014 indeks gini Indonesia cenderung memburuk 4,1 persen dan masih ada 28 juta masyarakat Indonesia yang berada dalam tingkat kemiskinan absolut (Badan Pusat Statistik, 2019).

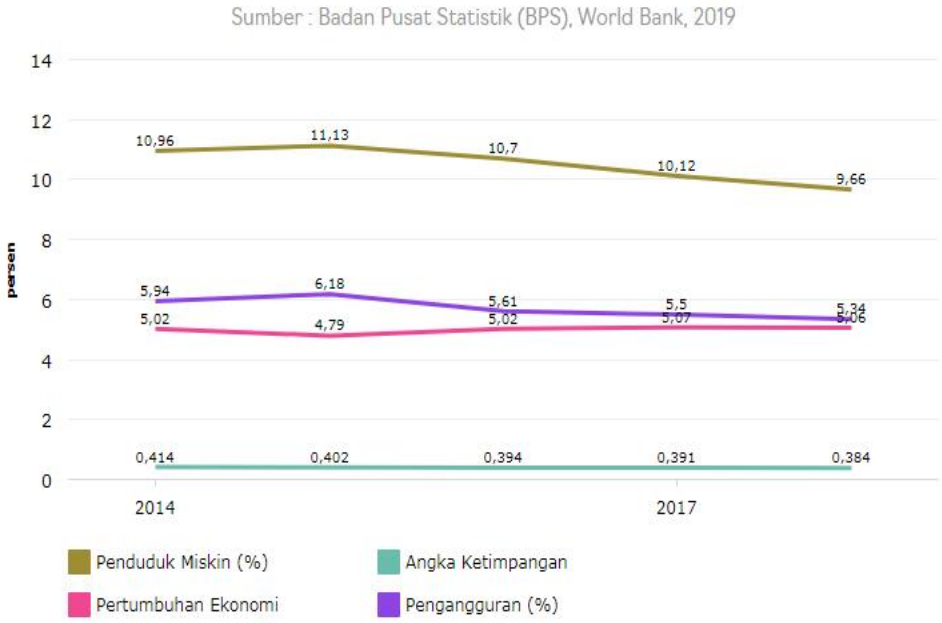

Gambar 1.1: Petumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan
(Sumber: BPS, 2019)

Ekonomi Indonesia periode 2015-2018 yang tumbuh sekitar 5 persen mampu menekan angka pengangguran, kemiskinan maupun ketimpangan. Pada 2018, ekonomi domestik berhasil tumbuh 5,17 persen dari tahun sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang diprogramkan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta program bantuan sosial yang diterapkan berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan dalam empat tahun (BPS, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran terbuka 2018 turun menjadi 7 juta jiwa atau 5,34 persen dari total angkatan kerja sebanyak 131 juta jiwa. Tingkat pengangguran ini merupakan yang terendah sejak 1999. Kemudian jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 25,7 juta jiwa atau 9,96 persen dari total populasi, terendah sepanjang sejarah. Demikian pula angka ketimpangan (gini rasio) Indonesia pada 2018 turun menjadi 0,384, terendah sejak 2011. Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta bantuan langsung non tunai berhasil menekan ketimpangan pengeluaran antara masyarakat miskin dan kaya (BPS, 2019).

Berbagai literatur telah banyak penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Tetapi lebih banyak berfokus pada peran kebijakan fiskal dalam mengatasi hal tersebut baik melalui instrumen redistribusi (pajak dan transfer) yang sebagian besar mempengaruhi kebijakan distribusi pendapatan saat ini , atau dalam bentuk (terutama program pendidikan dan kesehatan). Tentunya hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya. Tetapi diluar hubungan kebijakan fiskal ini, ada kebijakan dalam hal keuangan yang meningkatkan minatnya dalam pembangunan yang berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan (Purba, 2016).

Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah diperlukan alat ukur. Sarma (2012) mengembangkan alat ukur untuk mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah dengan merumuskan indeks inklusif keuangan. Dimana perumusan indeks ini dibagi menjadi 3 dimensi atau indikator yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan akses terhadap jasa layanan perbankan dan indikator

kegunaan. Pengukuran indeks inklusi keuangan dapat menjelaskan bahwa semakin tingginya indeks inklusi keuangan suatu wilayah menunjukkan sejauh mana strategi nasional keuangan inklusif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Keberhasilan pelaksanaan keuangan inklusif dapat tercapai jika masyarakat di semua wilayah Indonesia memiliki akses keuangan yang sama dan merata.

Keuangan inklusif yang dianggap sebagai salah satu cara agar semua orang dapat menikmati kesejahteraan dengan cara mengakses semua layanan keuangan yang ada harus dimulai dengan langkah nyata. Kebijakan di bidang keuangan inklusif merupakan langkah tepat di dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Implementasi *Financial Inclusion* di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya lagi adalah Presiden Joko Widodo melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) seluruh Indonesia pada Tanggal 17 Januari 2016. TPAKD lahir dari kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. Oleh karena itu,TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera (Nasution, 2017).

Penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program salah satunya pembentukan Lembaga Penanggulangan Kemiskinan melalui

program PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk dana bergulir dan pengelolaannya sesuai dengan SOP yang berlaku pada setiap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Lembaga yang langsung mengelola kegiatan dana Bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). Pogram ini merupakan bentuk pemberian pinjaman jangka pendek kepada pemilik usaha mikro dan kecil anggota. Dana bergulir ini diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja usaha sehingga dapat menghasilkan manfaat kepada pemiliknya.

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Aceh, yang terdiri atas 12 kecamatan, 33 mukim, 322 desa. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng. Luas wilayahnya 2.927,95 km^2 dan jumlah penduduknya 210.113 jiwa (BPS Aceh Barat, 2020). Pertumbuhan ekonomi meningkat juga didukung oleh perkembangan perbankan di kabupaten Aceh Barat yang cukup baik. Perkembangan perbankan juga dapat dilihat dari infrasrtuktur fisik yaitu jumlah bank dan jumlah kantor cabang yang didirikan di daerah-daerah dan juga jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Bank di kabupaten Aceh Barat.

Salah satu kecamatan yang masih mendapatkan dana bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan adalah Kecamatan Meureubo, dimana kecamatan ini memiliki 26 desa. Adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat miskin melalui akses jasa keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Akses

perbankan yang mudah bagi kelompok masyarakat miskin ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal, yang dapat mempercepat pertumbuhan agregat, dan mengurangi hambatan dalam akses kredit produktif, yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin sehingga dapat mengentaskan dari kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara tidak langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Perekonomian kabupaten Aceh Barat yang semakin berkembang yang dapat dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi yang tumbuh walaupun pada tahun-tahun terakhir mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Barat yang semakin baik ternyata belum dapat mensejahterakan masyarakatnya, dimana kemiskinan masih menjadi persoalan dalam perekonomian Kabupaten Aceh Barat dengan tingkat kemiskinan 39.290 jiwa penduduk miskin. Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi belum kabupaten Aceh Barat belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena ketimpangan merupakan masalah ekonomi-sosial yang masih menjadi persoalan yang belum diselesaikan. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

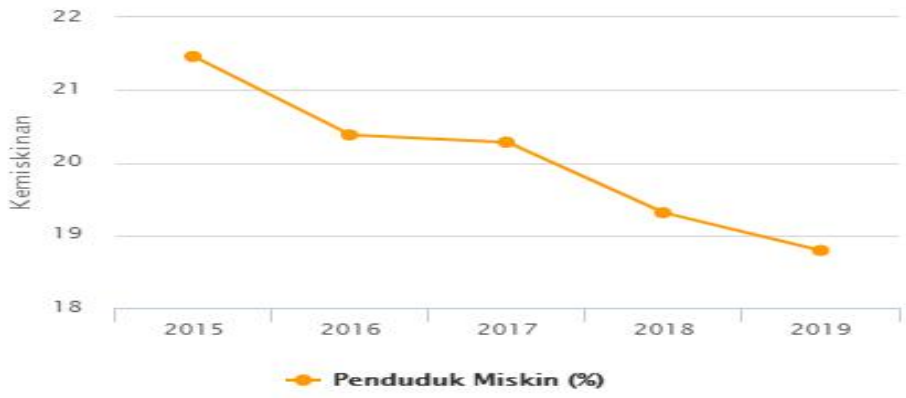

Gambar 1.2: Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat
(Sumber: BPS Aceh Barat, 2020)

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah jumlah penduduk miskin dari pada tahun 2015 sebesar 21,46 persen, pada tahun 2016 mengalami penurunan, yaitu sebesar 20,38 persen, pada tahun 2017 megalami penurunan yaitu 20,28 persen juga pada tahun 2018 sebesar 19,31 persen, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi 18,79 persen.

Perkembangan perbankan terjadi di kabupaten Aceh Barat tetapi ketimpangan justru semakin besar dan kemiskinan yang masih ada walaupun memiliki *trend* cenderung menurun tetapi masih tetap menjadi sebuah masalah dalam perekonomian. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait hubungan perbankan di kabupaten Aceh Barat terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Maka peneliti memilih judul penelitian **"Analisis Finansial Inklusi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020)"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya adalah bagaimana mekanisme finansial inklusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme finansial inklusi terhadap

pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020) di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkait sistem aplikasi konsep finansial inklusi dalam memperluas akses jasa keuangan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin.
b. Bagi pihak UPK Kecamatan Meureubo, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman mengembangkan langkah-langkah dalam pengentasan masyarakat miskin. Selain itu juga sebagai lembaga keuangan yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di bidang jasa keuangan pada masa yang akan datang.
c. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan dimasa yang akan datang dalam rangka mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi pada tiap daerah di kabupaten Aceh Barat.
d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan membawa manfaat.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan proposal skripsi ini maka penulis telah membagi tulisan ini kedalam bagian yang meliputi:

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bagian kedua menguraikan tentang landasan teori yang berisikan tentang desfinisi dari finansial inklusi, konsep pemberdayaan, kemiskinan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bagian ketiga menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan model analisis data.

Bagian empat berisi tentang hasil dan pembahasan yang didalamnya dijelaskan mengenai statistik dekriptif, hasil penelitian dan pengujian hipotesis.

Bagian lima berisi kesimpulan dan saran yang didalamnya dijelaskan mengenai simpulan-simpulan yang diambil dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran. Serta dalam skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang penulis gunakan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Finansial Inklusi

2.1.1 Pengertian Finansial Inklusi

Istilah finansial inklusi atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju (Mirza, 2014).

Finansial inklusi adalah Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan utnuk meniadakan segala bentuk hambatan, baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaat layanan jasa keuangan. Walau mereka tergolong *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) serta tidak mempunyai tabungan (*saving*) dapat dipercaya antar mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (*holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dan sebagainya yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak dan sebagainya. Sampai pada pemikiran ini pun adakalanya mereka lupa, dengan menguangkan *holding* diharapkan bisa menjadi salah satu jalan

menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina (Ningrum, 2018).

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*middle and high income*) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka masing-masing (Sarma, 2012).

Finansial inklusi (Keuangan Inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Finansial inklusi merupakan sebagai bentuk strategi nasional finansial inklusi yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan tejangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat (Ummah, 2015).

Finansial inklusi merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Pada dasarnya kebijakan finansial inklusi adalah

suatu bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman *(keeping)*, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

2.1.2 Visi dan Tujuan Finansial Inklusi

Visi nasional *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif) dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Menurut Tanuwidjaja (2014), tujuan finansial inklusi tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

1) Menjadikan strategi finansial inklusi sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.
2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep finansial inklusi harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam finansial inklusi adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman beinteraksi dengan lembaga keuangan.
4) Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuanan umumnya berupa masalah geografi dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
5) Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangaan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan

kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formula. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.

6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk meneyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

2.1.3 Manfaat Finansial Inklusi

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi *unbanked*, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (masyarakat), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *design produk barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Finansial inklusi mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2) Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3) Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
4) Mendukung pendalaman pasar keuangan.
5) Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
6) Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
7) Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
8) Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan (Purba, 2016).

2.1.4 Strategi Nasional Finansial Inklusi

Finansial Inklusi ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasankemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat

padamasyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami hambatan untukmengakses layanan keuangan (Nikie, 2012).

a. Kerangka Finansial Inklusi

Kerangka kerja umum finansial inklusi dibangun di atas enam pilar sebagai berikut:

1. Edukasi keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang ada dalam pasara keuangan formal. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi:
   a) Pengetahuan dan keasadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan
   b) Pengetahuan dan kesadaran tentang resiko terkait dengan produk keuangan
   c) Perlindungan nasabah
   d) Keterampilan mengelola keuangan.
2. Fasilitas keuangan publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi:
   a) Subsidi dan bantuan sosial
   b) Pemberdayaan masyarakat
   c) Pemberdayaan UMKM .
3. Pemetaan informasi keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankbale* oleh intitusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif pilar ini meliputi:
   a) Peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis
   b) Sistem jaminan alternatif
   c) Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana
   d) Identifikasi nasabah potensial.
4. Kebijakan atau peraturan yang mendukung. Pilar ini mengacu pada kebutuhan untuk menambah atau memodifikasi peraturan, baik oleh pemerintah atau BI, untuk meningkatkan akses akan jasa keuangan. Pilar ini meliputi beberapa aspek:
   a) Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
   b) Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
   c) Mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional
   d) Menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan
   e) Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan
   f) Menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan (Mirza, 2014).

5. Fasilitas intermediasi dan saluran ditribusi. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi:
   a) Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetri,
   b) Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha
   c) Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
6. Perlindungan konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institui keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang ada pada pilar ini meliputi:
   a) Transparansi produk,
   b) Penanganan keluhan nasabah
   c) Mediasi
   d) Edukasi konsumen.

b. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan finansial inklusi diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa refrensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah Negara dalam mengembangkan finansial inklusi adalah:
   1. Ketersediaan/akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
   2. Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan
   3. Kualitas: mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
   4. Kesejahteraan: mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa (Mirza, 2014).

Strategi finansial inklusi bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam Keuangan Inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional finansial inklusi diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

2.1.5 Regulasi Finansial Inklusi

Menurut Ningrum (2018), dasar regulasi dari finansial inklusi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 82/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan finansial inklusi di sektor jasa keuangan untuk konsumen dan/atau masyarakat yang berbunyi :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisioner otoritas Jasa Keuangan Menimbang :

a) Bahwa saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan
b) Bahwa keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tersebut berpengaruh pada masih rendahnya pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
c) Bahwa edukasi keuangan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan perlu diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
d) Bahwa untuk mendukung kegiatan edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, diperlukan pemberdayaan masyarakat dan sinergi antar Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat.

Pasal 10
PUJK wajib memberikan perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, serta menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. Bagian Kesatu Tujuan Inklusi Keuangan.

Pasal 11
Tujuan Inklusi Keuangan adalah:
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan formal;

b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal;
c. Meningkatnya pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Bagian Kedua Ruang Lingkup Inklusi Keuangan.

Pasal 12
PUJK melakukan kegiatan Inklusi Keuangan dengan ruang lingkup sebagai berikut:
a. Perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat; dan/atau
b. Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/ataumasyarakat.

Pasal 13
Perluasan akses keuangan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a termasuk penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14
1) PUJK wajib melakukan penciptaan skim atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK.
2) Dalam hal PUJK menyediakan skim, produk dan/atau layanan jasakeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib menyusun dan menyediakan pedoman untuk pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15
Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana termasuk produk dan/atau layanan jasa keuangan yang berbiaya murah (tanpa biaya), PUJK wajib menyampaikan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebutkepada calon Konsumen dan menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Implementasi Strategi Nasional Finansial Inklusi

Dari berbagai belahan dunia, untuk menurunkan finansial inklusi dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania atau melalui berbagai program

terpisah, misal edukasi keuangan seperti dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, *responsible finance* melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan finansial inklusi umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran (TKI) sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum (Julius, 2012).

Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh Kementrian/instansi terkait dalam rangka implementasi strategi nasional finansial inklusi. Hal ini menunjukkan komitmen dari berbagai Kementrian/instansi terkait untuk secara aktif berupaya mengimplementasikan rencana-rencana masa depan serta program-program yang berkaitan dengan strategi nasional finansial inklusi diantaranya:

1. Peran finansial inklusi sangat penting untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan.
2. Penerapan SNKI memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sendiri.
3. Proses implementasi dan pemantauan strategi national Keuangan Inklusif akan terbagi dalam:
   a. Inventarisasi ketersediaan data dan diagnosa kondisi saat ini
   b. Penentu target dan tujuan yang tercantum daam indikator kinerja utama
   c. Peran sektor publik dan swasta
   d. Pemantauan kemajuan kegiatan
4. Kepemimpinan diperlukan untuk mengkoordinasikan tindakan dan mempertahankan dorongan serta momentum untuk reformasi (Hermansyah, 2014).

2.2 Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama

pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2010).

Menurut Aziz dkk (2011), pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus *(break down)* dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalahberalihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosia l antar subyek dengan subyek lain.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan *(survive)* dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyara kat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Usman (2012) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif

solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Definisi pemberdayaan masyarakat, dimana secara khusus mengkaji tentang pemberdayaan dengan berbagai macam sudut pandang. Akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai teori yang diungkapkan diatas bermuara pada pemahaman yang hampir sama, yakni memberikan daya kepada mereka yang lemah agar dapat mandiri dalam menjalankan kehidupannya sehingga dikatakan berdaya.

Menurut Fahrudin (2012), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2.2.1 Tujuan Pemberdayaan

Pada bagian sebelumnya telah dikemukan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan daya seseorang, baik itu berupa

pengetahuan ataupun ketrampilan supaya kemampuan seseorang dapat lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pasti memiliki tujuan jelas yang nantinya akan berperan penting untuk terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dari sebelumnya.

Menurut Mardikanto (2014) tujuan pemberdayaan masyarakat ada enam poin, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (*better business*)
   Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (*better income*)
   Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
   Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan *(better living*)
   Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (*better community*)
   Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari pernyataan tersebut, berarti tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada intinya untuk melakukan perbaikan aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat, sehingga dapat merubah dan menjadikan kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, dalam proses pemberdayaan diperlukan partisipasi dari masyarakat agar program-progam pemberdayaan yang telah di susun dapat memberi manfaat bagi warga masyarakat dan lembaga itu sendiri.

Dalam program pemberdayaan masyarakat, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi menurut *United Nation* dalam Karsidi (2014) diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaataan hasil dan evaluasi program pemberdayaan. Istilah partisipasi sering juga diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan, sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial, yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi politik dan sosial, reformasi sosial, atau bahkan yang disebut revolusi rakyat (Slamet, 2014).

Dalam Usman (2012), menyebutkan "partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat". Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan bahwa partisipasi merupakan "keikutsertan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri".

Keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan tertentu, mulai dari perencanaan program pemberdayaan, pelaksanaan sehingga manfaat yang di dapat dari program pemberdayaan. Dengan begitu partisipasi merupakan sebuah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait untuk mengambil inisiatif menggunakan kebebasan untuk melakukan hal tersebut.

Dari definisi mengenai partisipasi masyarakat, kata kunci yang utama adalah adanya kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri.

Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, Dusseldorp membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan, antara lain (Mardikanto 2014):

a. Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri. Jadi partisipasi bentuk ini terjadi tanpa adanya pemaksaan dari pihak luar.
b. Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik berupa bujukan, pengaruh atau dorongan dari luar meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan yang sudah diberlakukan.

Mardikanto (2014), menjelaskan ada tiga variasi bentuk partisipasi ditunjukan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi yaitu:

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan diatasi. Jadi kegiatan yang di lakukan di sini tidak yang begitu berat dan menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan stabiltas nasional.
2. Partisipasi penuh (*full schale participation*), artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan. Disini keikutsetaan anggota akan program pemberdayaan masyarakat sangat luas.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadinya dan tidak diberi kesempatan

untuk turut mangajukan tututan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Pusic dalam Aristo (2014) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dapat di wujudkan dengan berbagai bentuk diantaranya:

1. Pikiran (*Psychological participation*), merupakan partisipasi yang di berikan dalam bentuk ide-ide, pengetahuan ataupun ilmu oleh seorang sukarelawan yang bergabung dalam sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat ataupun instansi lainnya.
2. Tenaga (*Physical participation*), merupakan partisipasi yang di berikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological participation dan Physical participation*), merupakan keikutsertaan seseorang dalam bentuk ilmu pengetahuan dan tenaga dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
4. Keahlian (*Participation with skill*), memberikan dorongan melalui keahlian yang di milikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.
5. Barang (*Material participation*), bentuk partisipasi untuk melengkapi sarana dan prasarana pada sebuah lembaga sosial dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Uang (*Money participation*), bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Jadi dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat, akan muncul partisipasi dari berbagai pihak yang ada di sekitarnya. Partisipasi tersebut dapat di

wujudkan dengan bentuk yang berbeda-beda, baik yang abstrak ataupun yang kongkrid.

Menurut Westra (1976) dalam Mardikanto (2014) cara-cara dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yaitu melalui:

a. Usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata. Ketika akan direncanakan program pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah melihat apa yang paling banyak di butuhkan dan di minati oleh masyarakat. Apabila program yang akan dilaksanakan banyak dibutuhkan dan menarik oleh mata masyarakat, maka yang akan terjadi partisipasi dari warga mayarakat akan sangat besar.
b. Usaha ini di dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki. Stimulasi yang dimaksudkan adalah sebagai masukan dan yang nantinya akan di jadikan pengantar dalam menimbulkan jawaban yang dikehendaki.
c. Usaha itu di jadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki. Dalam program pemberdayaan motivasi dari yang akan melakukan pemberdayaan sangatlah penting. Dengan demikian secara sadar atau tidak sadar akan dapat membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki.

Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan dapat memandirikan masyarakat. Partisipasi dari masyarakat merupakan perwujudan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi.

2.2.2 Tahapan Pemberdayaan

Dalam pengembangan masyarakat lokal, terdapat beberapa tahapan intervensi, Menurut Isbandi Rukminto Adi (2010), yaitu:

1. Tahapan persiapan
2. Tahapan Assesment, dalam proses *assesment* dilakukan pengidentifikasian masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang

dieksperikan (*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran.

3. Tahap penencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
4. Tahap pemformulasian rencana aksi, tahap ini merupakan tahapan yang kunci sebelum pelaksanaan program. Dalam tahap ini petugas memfasilitasi warga untuk menentukan prioritas program mana yang akan dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan warga.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam proses pengembangan masyarakat. Tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelumnya akan diuji dalam tahap ini. Oleh karena itu, baik petugas dengan warga maupun antar warga satu sama lain diharapkan mengupayakan dan menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam pelaksanaan program.
6. Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan. Pada tahap ini diharapkan adanya umpan balik yang berguna bagi proses pengembangan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh warga bersama petugas (*community worker*).
7. Tahap terminasi. Pada tahap ini mengakhiri secara formal intervensi dalam program pengembangan masyarakat. Berakhirnya program dalam pengertian di sini lebih dimaksudkan karena program telah sampai pada batas waktu yang telah direncanakan pada awalnya atau karena anggarannya sudah habis dan pihak penyandang dana telah menghentikan donasinya.

2.3 Kemiskinan

Secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Yaqin, 2019). Menurut Zulkarnain (2015), kemiskinan yaitu:

1. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang di dalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan

2. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda”.

Ragam penjelasan tentang kemiskinan atau persisnya tentang mengapa terjadi kemiskinan. Menurut Bradshaw (Sumodiningrat, 2011), ada lima penjelasan mengapa kemiskinan timbul, yaitu:

a. Kelemahan-kelemahan individual

b. Sistem budaya yang mendukung subkultur kemiskinan

c. Distorsi-distorsi ekonomi-politik atau diskriminasi sosial-ekonomi

d. Kesenjangan kewilayahan

e. Asal-usul lingkungan yang bersifat kumulatif.

Sebab musabab kemiskinan tidak bisa lepas dari konstentasi konseptual kanan-kiri dalam ilmu sosial. Lebih jauh Soetrisno (2013) menulis bahwa 5 tipe penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan yaitu:

a. Miskin karena gen kemiskinan

b. Miskin karena lingkungan yang memiskinkan (*cycle of deprivation*)

c. Miskin karena kegagalan-kegagalan kebijakan

d. Miskin karena rintangan-rintangan struktural (*structural constraints*) yaitu adanya kekuatan di luar dirinya yang menghalangi si miskin untuk bergerak dan berubah menjadi tidak miskin

e. Miskin sebagai fungsi dari kapitalisme karena tenaga kerja cadangan diperlukan dalam kapitalisme.

Pengelompokan kategori miskin:

1) Termiskin dari yang miskin

   Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena berbagai faktor seperti sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan.

2) Miskin berpendapatan rendah

   Mereka yang memilki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layana keuangan. Termasuk kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lainnya yang bersifat padat karya.

3) Miskin bekerja

   Kelompok penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal.

4) Bukan miskin

   Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.

5) Pekerja migrant domestik dan internasional

   Indonesia merupakan Negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah asia-pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migrant atau lazim disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan atau memiliki akses yang terbatas kelayanan keuangan. Mereka terutama

membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat dan murah dari tempat kerja ke rumah yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang teretak di daerah pedesaan dengan tingkat pendapatan yang rendah.

6) Perempuan

Di banyak Negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses kebutuhan dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan. Sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempun memiliki kesempatan yang sama untuk mempeunyai rekening tabungan Bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung untuk keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

7) Penduduk daerah terpencil

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memilki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sekitar 64 persen tinggal di daerah pedesaan. Angka-angka ini ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional Keuangan Inklusif untuk member perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan

untuk ketegori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Soetrisno, 2013).

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah tetapi menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah, swasta, lembaga profesi, perguruan tinggi maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan kemiskinan tersebut jika tidak diwaspadai serta dilakukan upaya dan langkah konkrit untuk menanggulanginya Akan membawa akibat yang buruk seperti menurunkan kualitas sumber daya manusia, timbulnya kecemburuan sosial, pengangguran, kerentanan, kriminalitas dan berbagai dampak negatif lainnya (Sadli, 2014).

Usaha memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Soetrisno (2013), bahwa ketidakberuntungan orang miskin haruslah diletakkan dalam konteks yang lebih luas: model pembangunan yang dianut, ketidakadilan sosial yang mengendap dalam sistem-struktur, dan berbagai kebijakkan sosio-ekonomi-politik yang tidak menguntungkan bagi si lemah dan miskin.

Menurut data PBB, 1/3 dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu sekitar 70 % dari mereka adalah perempuan. Karenanya perlu dilakukan cara yang tepat guna mengentaskan kemiskinan yang dialami perempuan. Di Indonesia sendiri, ada berbagai dimensi kemiskinan yang menimpa perempuan: akibat posisi tawar yang lemah di dalam masyarakat, kultur

yang represif, miskin akibat bencana dan konflik, diskriminasi di ruang publik dan domestik, serta tidak pedulinya negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat guna mengentaskan perempuan dalam kemiskinan (Todaro, 2013).

Faktor Penyebab Kemiskinan

Para ilmuwan sosial membagi dua jenis penyebab kemiskinan:

a. Kemiskinan terjadi karena faktor perilaku individu, bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan
b. Kemiskinan terjadi karena struktur sosial, keadaan masyarakat dan tatanannya yang tidak benar melahirkan kemiskinan (Slamet, 2014).

Dalam hal ini keadaan masyarakat yang miskin menjadikan individu-individu anggota masyarakatnya tidak produktif

Kompleksitas Kemiskinan

Ada berbagai pandangan dan pendapat mengenai kurang berhasilnya pemerintah dalam menanggulaangi kemiskinan tersebut. Gerakan Anti Kemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menganggap bahwa kegagalan pemerintah diakibatkan tidak adanya keberpihakan dan ketegasan sikap untuk membantu penduduk keluar dari kemiskinan. Pemerintah justru masih berkutat pada pendekatan stabilisasi makro daripada memperbesar belanja sosial bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, akibat kegagalan tersebut, Indonesia terpuruk kedalam kelompok Negara-negara terbelakang di Asia dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan global tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Capaian Indonesia setara dengan Bangladesh, Laos, dan Myanmar dan kalah dari Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam (Soetrisno, 2013).

Pandangan lain menyebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan selama ini tidak pernah efektif dan tidak berkelanjutan *(Unsustainable*), penanganannya hanya dilihat dari gejalanya bukan akar permasalahannya dan sebab-sebabnya. Padahal mengingat kompleksitas dan persoalannya yang multi dimensi penanggulangannya juga haruslah melalui strategi yang komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan (Utami dan Muslikhah, 2019).

Ada dua alasan mengapa *Gross National Product* (GNP) tidak serta merta membawa peningkatan standar hidup masyarakat.

1. Umumnya pertumbuhan penduduk di Negara-negara berkembang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi, sehingga secara komparatif tidak memberikan peningkatan taraf hidup secara signifikan.
2. Adanya ketidakadilan dan srukutur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin yang membuat *output* pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata, sehingga teori *trickle down effect* yang mendasari kebijakan diatas tidak berlaku sepenuhnya. Kemakmuran tersebut umumnya hanya akan menetas kepada lapisan masyarakat tertentu yang secara komparatif memiliki pengetahuan, keterampilan, daya saing dan *absorptive capacity* yang lebih baik. Sementara mereka benar-benar miskin dan mengalami apa yang disebut kemiskinan absolut jarang mengenyam hal pembangunan tersebut. Bahkan, sering pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik fisik maupun sosial (Muljawan, 2013).

Setelah menyadari tidak efektifnya pendekatan *trickle down effec*t tersebut dalam mengatasi kemiskinan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan

pola bantuan langsung, namun ini juga memunculkan implikasi baru. Di satus sisi bantuan tersebut memang dapat efektif mencapai sasaran, namun di sisi lain, hal tersebut menimbulkan ketergantungan dan mematikan kreasi dan inovasi masyarakat karena hanya memberikan bantuan tanpa adanya penguatan sosial (*sosial strengthening*). Persoalan lain ditemui pada saat penetuan target grup yang sering menimbulkan kontroversi dan kadang tidak mendapatkan dukungan dari komponen masyarakat lainnya.

2.4 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menurut petunjuk teknis oprasional adalah Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM). Pinjaman bergulir dikelola oleh UPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam siklus pembentukan UPK. Unit Pengelola Kegiatan, kegiatan yang dilakukan oleh UPK adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. Dalam hal ini warga miskin dianggap kurang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh UPK untuk meningkatkan taraf ekonomi warga miskin adalah pemberian pinjaman bergulir yang khusunya digunakan untuk mengembangkan usaha kecil.

Menurut Purnomo (2015), kriteria minimal Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang akan mengelola dana pinjaman bergulir adalah sebagai berikut :

a. Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang)
b. Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab

c. Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan

d. Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir

e. Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM dengan kewenangan penandatangan 3 orang

f. Telah memiliki Sistem Pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan

g. Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan):

   1) Mendapat tambahan modal dari dana BLM apabila kinerja pinjaman bergulir yang dijalankannya berupa pinjaman berisiko (PAR) mencapai kriteria memuaskan (<10%)

   2) Apabila mencapai kriteria minimal yakni PAR = 10% sd < 20% tidak ada tambahan dana dari BLM, UPK hanya dapat menggulirkan dana yang ada kepada KSM lama maupun baru

   3) Apabila kriteria penundaan yakni PAR = 20% hanya dapat menggulirkan dana yang ada kepada KSM lama yang pembayaran/pengembaliannya lancar.

   4) BKM/LKM bersama UPK wajib melakukan penagihan terhadap tunggakan dan apabila kinerja PAR mencapai kriteria minimal atau pengembalian tunggakan mencapai 60% dari kondisi saat penundaan bagi UPK yang pinjamannya telah jatuh tempo, dapat menggulirkan kembali kepada peminjam (KSM) lama maupun KSM baru yang layak dibiayai sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Tabungan KSM yang dititipkan melalui UPK tidak dapat digunakan untuk perguliran
6) Kinerja Pembukuan UPK minimal memadai.

Lembaga UPK PNPM Mandiri memiliki pengelola kegiatan yang disebut sebagai pengurus UPK yang berfungsi sebagai karyawan yang terdiri dari empat orang, antara lain: Ketua (Manajer UPK), Sekretaris (bagian administrasi/petugas pinjaman), Bendahara (bagian akunting/pembuku) dan Staf (pembantu umum/kasir) (Financien, 2018).

Penerima manfaat Pinjaman Bergulir sendiri pada dasarnya adalah untuk seluruh warga miskin yang tercantum dalam PJM LKM (Program Jangka Menengah LKM) yang diidentifikasi melalui PS (Pemetaan Swadaya). Pinjaman Bergulir harus dimanfaatkan untuk kepentingan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan atau kesejahteraan mereka.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Metode Analisis
1.	Dede Aji Mardani (2018)	Peran perbankan syariah dalam me-ngimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini mem-buktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam meng-implementasikan *financial inclusion*, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan

				juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik
2.	Herman Ahmadi (2018)	Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong *Financial Inclusion*	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan mendorong kegiatan perekonomian, PT. BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Madiun hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kota dengan leluasa. Tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah serta kondisi geografis wilayah Madiun yang tidak terjangkau oleh akses layanan perbankan merupa-kan faktor-faktor yang menghambat financial inclusion. Serta harus mem-benahi diri dari banyaknya ham-batan-hambatan da-lam penerapan BRIlink sehingga pengguna dan agen lebih dapat mening-katkan kualitas hidup karena kemudahan layanan BRIlink, PT. BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Madiun sering melakukan evaluasi pada penerapan BRIlink ,serta memi-nimalkan kendala, serta memperbanyak pelatihan dalam penggunaan mesin EDC
3.	Hairatunnisa Nasution (2019)	Analisis *Financial Inclusion* Terhadap Pemberdayaan Ma-syarakat Miskin di Medan (Studi Kasus	Penelitian ini me-nggunakan pende-katan kualitatif	Bank Sumut Syariah mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya yaitu Pembiayaan Sumut Sejahtera. Fasilitas pembiayaan ini memiliki tujuan mulia diberikan

		Pembiayaan Mikro SS II di Bank Sumut Syariah)		kepada masyarakat pra-sejahtera yang memiliki usaha mikro untuk meningkatkan peran masyarakat dan membina pengusaha mikro yang memiliki kelayakan usaha tetapi belum *bankable* sehingga menjadi layak menjadi nasabah bank, serta meningkatkan taraf hidup rakyat dan membantu program Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Penerapan *Financial Inclusion* Pembiayaan Sumut Sejahtera masuk kedalam prinsip dasar ekonomi Islam yaitu *maqashid alSyariah*. bagi *Financial Inclusion* teori *maqashid asy-syari'ah* adalah salah satu usaha logis yang wajib diterapkan sebagai konsekuensi dari pemahaman ekonomi yang berkeadilan di satu sisi dan berketuhanan di sisi lain.
4.	Lokot Zein Nasution (2020)	Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pember-dayaan Masya-rakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Man-dailing Natal	Penelitian ini mengadopsi *Cluster Analysis* dan pendekatan evaluatif dan literature review	Terdapat relevansi yang kuat antara adopsi syariah dengan eliminasi perilaku *moral hazard* dan pe-ningkatan produktivitas usaha. Keduanya bisa tercapai akibat transformasi karakter masyarakat sasaran me-lalui kegiatan pember-dayaan. Capaian tersebut mempertegas bahwa terdapat hubungan yang kuat antara prinsip syariah terhadap efektivitas program pemberdayaan.
5.	Lina Marlina dan Biki	Peran Lembaga	Penelitian ini dilakukan dengan	Pelaku usaha mikro memerlukan peran LKS

	Zulfikri Rahmat (2018)	Keuangan Syariah Dalam Mengimple-mentasikan Keuangan In-klusif Bagi Pe-laku UMKM Tasikmalaya	menggunakan metode survai dengan pendekatan kualitatif.	terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk mem-perluas pasar dan mengembangkan usa-hanya sehingga ber-kontribusi besar dalam perekonomian nasional, LKS dengan institusi ZISWAF-nya mampu memberikan jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konsumtif dan bisa menutupi kebutuhan dasar investasi UMKM.
6.	Sofuan Jauhari (2018)	Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengemba-ngan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pene-litian kualitatif dengan pendeka-tan studi kasus. Teknik analisa data dilakukan secara induktif.	Implementasi keuangan inklusif untuk pemberdayaan masyara-kat melalui pengemba-ngan usaha mikro di LMI Kota Kediri diwujudkan dalam program yang disebut dengan KUBerdaya. Program ini berupaya memberikan kemudahan akses keuangan kepada kelompok non-bankable dengan cara memberikan pinjaman modal usaha ataupun bantuan bantuan alat kerja untuk mengembangkan usaha mikro yang mereka jalankan. Tujuan program ini berhasil tercapai tapi belum secara maksimal.
7.	Septy Hajjariah (2019)	Emberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pinjaman Bergulir Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dalam penyaluran pinjaman, pendayagunaan pinja-man dan pendampingan pinjaman sudah ter-laksana dengan baik, adapun faktor peng-

		(PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desateluk Tigo (Studi Kasus Di Kecamatan Nan Gedang)		hambat pinjaman ter-dominan adalah ter-lambatnya pembayaran pinjaman.
8.	Dewi Kustika Ningrum (2018)	Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan di Jawa Timur Periode Tahun 2011-2015	Metode penelitian yang digunakan adalah perhitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) atau *Index of Financial Inclusion* (IFI) dan regresi linier sederhana.	Inklusi keuangan signifikan mempengaruhi secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Semakin tinggi inklusi keuangan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sedangkan inklusi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan.
9.	Bintan Badriatul Ummah, Nunung Nuryartono, Lukytawati Anggraeni (2015)	Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia	Data tersebut bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan berbagai sumber yang terkait. Periode analisis dalam penelitian ini adalah tahun 20072011 dengan *cross section* dari 33 provinsi di Indonesia.	1. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan di Indonesia adalah ukuran perekonomian, distribusi pendapatan yang digambarkan oleh koefisien gini, jumlah pengguna internet dan jumlah pengguna telepon seluler. Tingkat pengangguran dan rasio. 2. Inklusi keuangan memiliki hubungan

				searah dengan pemerataan pendapatan di Indonesia. Distribusi pendapatan di suatu daerah mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut, tetapi tidak sebaliknya.
10.	Afifah Siti Muslikhah, Efri Diah Utami	Pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia Tahun 2012-2017	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh yang signifikan yaitu inflasi berpengaruh positif dan UMP riil berpengaruh negatif, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan.

2.6 Kerangka Pemikiran

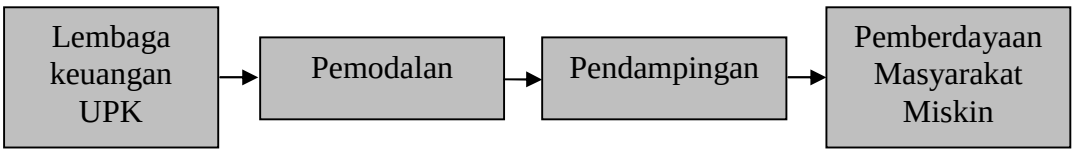

Gambar 2.1:
Kerangka Pemikiran

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian memiliki ruang lingkup tentang finansial inklusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yaitu pada aspek pemodalan dan pendampingan dari Lembaga keuangan UPK-PNPM Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincolyn menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014).

Menurut Moleong (2014), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi

dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur karyawan atau pegawai UPK Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan nasabah (peminjam), yang terlibat dalam pembiayaan mikro. Data skunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari UPK Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.

3.3 Tehnik Pengambilan Informan

Menurut Burhan (2013), yang dimaksud dengan Informan penelitian adalah orang yang bertugas memberi laporan atau kerterangan tentang sesuatu. Jadi dalam mencari data dan informasi, disini penulis hanya memilih orang yang benar-benar mengerti tentang permasalahan yang penulis butuhkan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberi informasi atau keterangan dan orang yang menjadi sumber dalam penelitian (nasabah pembiayaan di UPK-PNPM Kecamatan Meureubo dan pegawai UPK-PNPM Kecamatan Meureubo). Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala UPK Kecamatan Meureubo	1 orang
2.	Staf UPK Kecamatan Meureubo	3 orang
3.	Nasabah UPK Kecamatan Meureubo	10 orang
Jumlah		13 orang

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

   Beberapa yang dapat diperoleh dari observasi adalah tempat, pelaku kegiatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Dilakukannya observasi ialah berguna untuk menyajikan gambaran yang realistis perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, dan membantu mengerti perilaku informan. Dan juga untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap pengukuran. Observasi dilakukan pada UPK-PNPM Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat pada pembiayaan tahun 2020.

2. Wawancara

   Wawancara yang dilakukan disini adalah wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* (wawancara mendalam), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya

3. Dokumentasi

   Dokumentasi disini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat kejadian yang ada dilapangan dengan memanfaatkan data sekunder yang ada. Data atau dokumentasi tersebut sebagai tambahan

atau pelengkap dari penggunan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5 Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Model analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

   Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan finansial inklusi dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan studi kasus pembiayaan mikro oleh UPK-PNPM kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

2. Tahap penyajian data

   Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu Analisis finansial inklusi dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan studi kasus pembiayaan mikro oleh UPK-PNPM kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

   Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

3.6 Definisi Operasional Variabel

1. Finansial inklusi, merupakan bentuk strategi nasional Keuangan Inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga

keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan tejangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat

2. Pemberdayaan masyarakat miskin adalah **s**ebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi serta politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandirian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Wilayah Kecamatan Meureubo

Kecamatan Meureubo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Meureubo merupakan nama dari Ibu Kota Kecamatan ini, dengan luas wilayah adalah 112,87 Km^2. Sedangkan untuk persentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten adalah 3,85%. Jumlah Mukim yang terdapat di Kecamatan ini adalah 2 mukim, dan terdiri dari 26 Gampong.

4.1.2 Batas Wilayah

Hubungan Kecamatan Meureubo dengan beberapa Kecamatan lainnya sangat dekat, hal tersebut sesuai dengan batas-batas wilayah Kecamatan ini dengan Kecamatan lainnya:

a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Pante Ceureumen

b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Samudera Indonesia

c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Johan Pahlawan

d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Nagan Raya

4.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2021 adalah sebanyak 31.486 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduknya

tersebar pada 26 Gampong yang ada di Kecamatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 4.1 berikut ini.

Tabel. 4.1
Jumlah Penduduk dan Rata Pertumbuhan Pertahun di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1	Peunaga Cut Ujong	1329
2	Gunong Kleng	2138
3	Peunaga Pasi	372
4	Peunaga Rayeuk	1779
5	Paya Peunaga	6045
6	Langung	2210
7	Meureubo	2438
8	Ujong Drien	1357
9	Pasi Pinang	631
10	Ujong Tanjong	1517
11	Bukit Jaya	479
12	Buloh	214
13	Ranto Panyang Timur	748
14	Ranto Panyang Barat	665
15	Mesjid Tuha	730
16	Ujong Tanoh Darat	3693
17	Ranub Dong	702
18	Pasi Mesjid	1009
19	Pulo Teungoh Ranto	334
20	Balee	1020
21	Sumber Batu	269
22	Pasi Aceh Baroh	727
23	Pasi Aceh Tunong	579
24	Reudeup	232
25	Pucok Reudeup	96
26	Paya Baro RT. Panyang	173
Jumlah		31.486

Sumber : BPS, Pendataan Desember 2021

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4.1 di atas, mayoritas penduduk terbanyak yang ada di Kecamatan Meureubo menurut BPS pada Tahun 2021 berada di Gampong Paya Peunaga yakni sebesar 6045 pada, disusul oleh Gampong Ujong Tanoh Darat yakni berjumlah 3693 jiwa (orang).

4.1.4 Sejarah Singkat Terbentuknya Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di perkotaan maka meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang masuk pertama kali ke Kecamatan Meureubo pada tahun 2007. Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Meureubo adalah merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan yang lahir dari sebuah proses kegiatan PNPM yang dimulai tahun 2007 dengan tugas pokok sebagai pengelola kegiatan pembangunan partisipatif, pengelolaan perguliran (*Micro Finance*) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkat kelurahan. Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Meureubo di bentuk pada tahun 2015 melalui musyawarah.

Adapun Visi, misi dan tujuan dari masyarakat dan Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Visi**

   Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Meureubo yang bersih dan sehat melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana.

2. **Misi**

   a. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Meureubo yang bersih dan sehat melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana.

   b. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Meureubo terutama masyarakat kurang mampu, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan

sumber daya dan membudayakan kemitraan sinergis antara masyarakat dengan pelaku pembangunan lokal lainnya.

c. Mewujudkan Kecamatan Meureubo, semakin memberdayakan sistem dan struktur kelembagaan kelurahan.

d. Pengembangan Pengelolaan Perguliran (*Micro Finance*) dalam peningkatan akses ekonomi bagi kelompok usaha mikro ataupun kecil.

3. Tujuan

Sebagai upaya (misi) dalam mencapai pemerataan ekonomi yang sudah disepakati oleh masyarakat Kecamatan Meureubo maka ditentukanlah tujuan dalam penyusunan program jangka menengah ini adalah :

a. Adanya sarana dan prasarana lingkungan yang bersih dan sehat serta memadai bagi warga miskin.

b. Meningkatkan pendapatan warga miskin.

c. Menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya partisipasi warga miskin dalam hal pendidikan.

d. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi warga miskin.

4.1.5 Strukrur Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

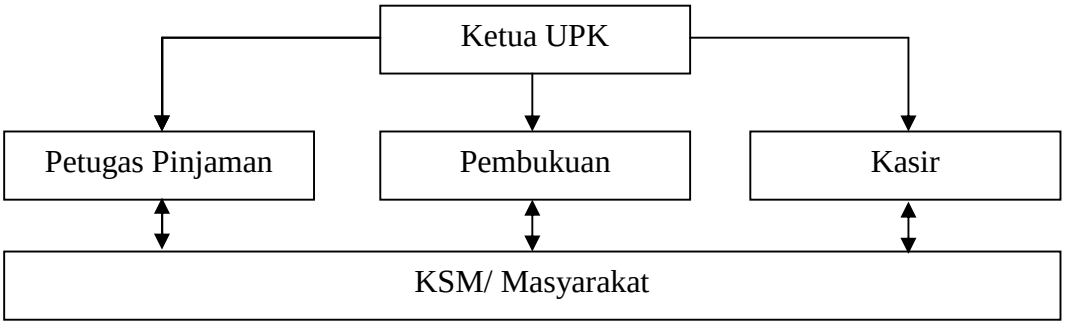

Gambar 4.1: Strukrur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Meureubo

Keterangan:

Ketua UPK	:	Pemimpin yang bertanggung jawab kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atas seluruh kegiatan Unit Pengelola Kegiatan
Petugas Pinjaman	:	Petugas Unit Pengelola Kegiatan yang bertanggung jawab kepada Manajer Unit Pengelola Kegiatan dalam menangani pinjaman dengan tugas mempromosikan, memeriksa, mengusulkan, membina peminjaman dan menagih tunggakan yang ada
Pembukuan	:	Petugas Unit Pengelola Keuangan yang bertanggung jawab kepada Manajer Unit Pengelola Kegiatan atas kegiatan pembukuan dan laporan keuangan
Kasir	:	Petugas Unit Pengelola Keuangan yang bertanggung jawab kepada Manajer Unit Pengelola Kegiatan atas pengelolaan kas Unit Pengelola Keuangan
KSM/ Masyarakat	:	Sekelompok masayarakat yang tergabung dalam kegiatan LKM PNPM Mandiri Perkotaan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme finansial inklusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Kasus Pembiayaan UPK Tahun 2020) di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang berasal dari modal stimulan Dana Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang disalurkan oleh Unit Pengelola Keuangan kepada masyarakat miskin di kelurahan/desa sebagai salah satu

program yang disediakan oleh PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program Pinjaman Bergulir ini merupakan salah satu pilihan masyarakat dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Pinjaman bergulir harus dimanfaatkan untuk kepentingan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan atau kesejahteraan mereka. Menurut Bapak Sabirin, selaku Ketua UPK Kecamatan Meureubo mengatakan bahwa:

> "Jumlah dana yang di terima oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Meureubo pertama kali adalah sebesar Rp. 150.000.000,- untuk disalurkan ke Kelompok Swadaya Masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Sedangkan pembagian hasilnya diatur oleh Aturan Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) dengan perinciannya adalah 12% untuk pengembalian ke UPK 6% untuk pembagian kelompok swadaya masyarakat dalam hal ini kelompok simpan pinjam perempuan (SPP)" (Hasil Wawancara Tanggal 30 Juni 2021)

Untuk dapat memperoleh pinjaman bergulir, perlu diketahui terlebih dahulu ketentuan pinjaman bergulir, menurut keterangan dari Ibu Sartika Musfira, selaku staf UPK Kecamatan Meureubo mengatakan ketentuan pinjaman bergulir di UPK Kecamatan Meureubo adalah sebagai berikut:

1. Peminjam adalah mereka yang tergabung dalam SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang terdiri dari 5 orang atau lebih.
2. SPP calon peminjam disyaratkan memiliki anggota perempuan adalah warga masyarakat dari salah satu desa Kecamatan Meureubo
3. Para anggota SPP tersebut telah memiliki usaha atau memulai usaha baru.
4. Para anggota SPP tersebut bersedia menanggung renteng (menanggung besama-sama) terhadap pembayaran anggota lain yang menunggak.
5. Besar Pinjaman awal Rp 2.000.000,- per anggota, dan pinjaman berikutnya maksimal Rp. 5.000.000,- per anggota tergantung kelancaran pembayaran dan keadaan keuangan UPK serta perkembangan usaha anggota SPP.
6. Jasa Pinjaman ditentukan oleh UPK sebesar 12% - 18% per bulan dihitung dari pokok mula-mula.
7. Jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun.
8. Pembayaran angsuran maksimal dilakukan bulanan (Hasil Wawancara Tanggal 1 Juli 2021).

Lebih lanjut Sartika Musfira menjelaskan tentang tata cara pengajuan pinjaman bergulir yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tertera dalam petunjuk teknis pinjaman bergulir yaitu **:**

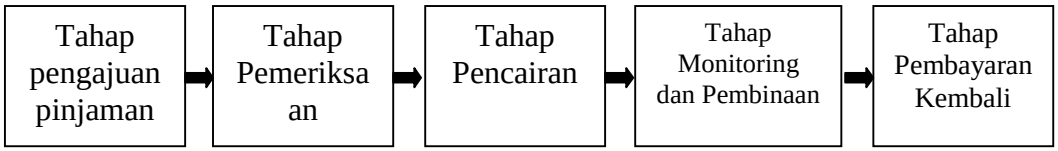

Gambar 4.2. Mekanisme Finansial Inklusi di UPK Kecamatan Meureubo

1. Tahap pengajuan pinjaman
   Pada tahapan ini pengajuan pinjaman dilakukan secara berkelompok sebelum penentuan jumlah pinjaman yang di ajukan masing-masing anggota SPP memberikan data kebutuhan dana usaha sebagai pengajuan atau setiap anggota SPP melakukan musyawarah. Penentuan jumlah pinjaman yang akan diajukan ini tergantung dengan kebijakan dari masing-masing SPP.
   Syarat awal yang dibutuhkan untuk pengajuan adalah berita acara pembentukan SPP, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), surat perjanjian kredit, foto copy lembar verifikasi SPP, hasil indentifikasi kelompok/verifikasi usulan SPP, Lembar verifikasi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), proposal pengajuan, daftar pinjaman, jumlah dan jenis usaha masing-masing anggota, rencana kegiatan kelompok, surat pernyataan kelompok, surat pernyataan tanggung renteng, surat persetujuan saksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) kelompok rencana pengembalian penjaman kelompok, rencana pengembalian penjaman anggota kelompok, daftar nama anggota kelompok SPP, surat persetujuan ahli waris, foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) penggurus dan anggota kelompok, dan fotocopy jaminan agunan masing-masing anggota SPP.
2. Tahap Pemeriksaan
   Pada tahapan ini pengurus UPK melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun pemeriksaan ke lapangan untuk menentukan layak tidaknya SPP tersebut mendapat pinjaman. Dalam menentukan kelayakan suatu pinjaman petugas UPK berpegang pada petunjuk teknis pinjaman bergulir.
3. Tahap Pencairan
   Setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan. Petugas UPK memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala UPK. Selanjutnya Kepala UPK beserta pengurus UPK yang ditunjuk memutuskan permohonan pinjaman yang diterima. Setelah permohonan tersebut diputuskan SPP yang permohonan pinjamanya disetujui menyiapkan dokumen untuk realisasi pinjaman yang berisi surat

perjanjian pinjaman bermaterai Rp 6.000 dan bukti kas keluar UPK yang telah ditandatangani oleh SPP. Setelah itu kasir menyerahkan uang, bukti uang keluar dan kartu pinjaman kepada pengurus SPP.

4. Tahap Monitoring dan Pembinaan
   Pembinaan dan monitoring ini dilakukan selain untuk melihat perkembangan usaha dan memberikan masukan juga sebagai suatu sarana untuk menghindari kredit macet. Setiap pengurus UPK diberi tanggung jawab untuk monitoring dan pembinaan SPP yang berada di dusun tempat pengurus tersebut berdomisili atau berkerjasama dengan kepala dusun.
5. Tahap Pembayaran Kembali
   Sebelum tahap pembayaran ini biasanya dua bulan sebelum jatuh tempo pengurus UPK akan mengingatkan waktu jatuh tempo agar masing-masing anggota SPP dapat mempersiapkan. Dokumen yang dibutuhkan adalah Kartu Pinjaman, bukti kas masuk dan kartu tabungan. Dokumen tersebut diserahkan berserta uang (pokok dan jasa) kepada pengurus UPK. Apabila ada SPP yang tidak mampu membayar penyelesaianya dapat dilakukan dengan pendekatan pengurus UPK kepada SPP yang bermasalah (Hasil Wawancara Tanggal 1 Juli 2021).

Kredit macet adalah kendala yang biasa dihadapi oleh UPK dalam menjalankan program pinjaman bergulir. Apabila SPP tidak mampu membayar penyelesaiannya UPK akan memberikan sanksi yaitu dengan tidak memberikan pinjaman kembali kepada SPP yang pernah melakukan kredit macet setelah diberikan keringanan atau toleransi dalam pembayaran melaluipendekatan pengurus UPK kepada SPP yang bermasalah.

Menurut pernyataan dari Bapak Sabirin adalah:

> “Pendekatan pengurus UPK kepada SPP dilakukan untuk memberikan toleransi yaitu berupa kemudahan dalam pembayaran angsurannya sesuai dengan kemampuan dari KSM. Toleransi ini diberikan UPK kepada SPP dengan tujuan agar SPP tetap bisa membayar angsuran yang diberikan sesuai dengan kemampuannya walaupun jangka waktu pembayarannya tidak sesuai perjanjian di awal” (Hasil Wawancara Tanggal 30 Juni 2021).

Hal tersebut berdampak baik pada SPP yang bermasalah, dengan toleransi yang diberikan, SPP lebih mudah membayar walaupun tidak sesuai dengan

prosedur. Hanya dengan cara tersebutlah yang dapat dilakukan oleh pihak UPK agar uang yang telah dipinjamkan dapat kembali.

Kehadiran program pinjaman bergulir UPK Kecamatan Meureubo berdampak sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu usaha mereka sendiri yang sekarang tidak lagi kesulitan dalam soal permodalan. Adanya program ini juga dapat membantu meningkatan perekonomian keluarga.

Upaya pinjaman bergulir UPK Kecamatan Meureubo dalam pengembangan usaha kecil yang ada di dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan kepada perempuan. UPK Kecamatan Meureubo tidak memfokuskan pada satu atau dua gampong saja yang menjadi prioritas dalam pemberian pinjaman UPK Kecamatan Meureubo. Wawancara dengan Sabirin selaku ketua UPK Kecamatan Meureubo bahwa:

> “Yang diprioritaskan itu tidak ada, semua gampong yang ada di Kecamatan Meureubo berhak menerima pinjaman dan memiliki hak yang sama, akan tetapi kenapa belum semua desa yang disalurkan ? itu dikarenakan ada beberap desa yang sudah masuk daftar hitam, karena kelompok dari Desa tersebut tidak serius dalam membayar angsuran yang sudah di tetapkan” (Hasil Wawancara Tanggal 30 Juni 2021)

UPK Kecamatan Meureubo melakukan penyaluran pembiayaan bagi kaum perempuan agar bisa membantu perkembangan ekonomi. UPK Kecamatan Meureubo sudah menjadi sumber alternatif pembiayaan bagi nasabah dengan diberikan modal pembiayaan, dengan memantau setiap perkembangan kegiatan nasabah pembiayaan termasuk mengadakan kunjungan kepada mereka yang memberikan peringatan dini jika terjadi penurunan kualitas pembiayaan yang diperkirakan mengandung resiko bagi UPK Kecamatan Meureubo.

SPP dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial. SPP-SPP yang dibentuk ini adalah atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan. Berikut adalah hasil observasi terhadap beberapa informan penelitian dari masyarakat selaku anggota SPP UPK Meureubo:

Tabel 4.2
Analisis Pinjaman Anggota SPP-UPK Kecamatan Meureubo

No	Nasa-bah	Alamat	Usaha	Pinjaman (Rp)	Jumlah Pengem-balian/ bulan	Penghas i-lan/hari	18% Bunga Pengem -balian	Total Pinjaman
1	NML	Ujong Tanjong	Kios kelontong	3.000.000	295.000	80.000	540.000	3.540.000
2	RDN	Paya Peunaga	Penjual ikan	5.000.000	492.000	75.000	900.000	5.900.000
3	SRY	Paya Peunaga	Pembuat kue basah	2.000.000	196.666	70.000	360.000	2.360.000
4	AFR	Meureubo	Pembuat kue	3.000.000	295.000	150.000	540.000	3.540.000
5	YSI	Meureubo	Usaha dagang sayur dan jajanan	3.000.000	295.000	70.000	540.000	3.540.000
6	AMW	Peunaga Rayeuk	Warung gorengan serta makan ringan	5.000.000	492.000	120.000	900.000	5.900.000
7	DSM	Peunaga Cut Ujong	Jualan pakaian keliling	6.000.000	590.000	150.000	1.080.0 00	7.080.000
8	NRT	Pasi Aceh	Jualan jajanan (kios)	3.000.000	295.000	100.000	540.000	3.540.000
9	EMN	Pasi Mesjid	Pembuat kue kering	2.000.000	196.666	70.000	360.000	2.360.000
10	RTN	Ujong Drien	Usaha kios jajanan	5.000.000	492.000	80.000	900.000	5.900.000

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2021

1. Berdasarkan wawancara dengan Ibu NML selaku ketua SPP kelompok Anggrek ia mengatakan bahwa, pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan ditambah 18% pertahun, sehingga total pinjaman tersebut sebesar Rp. 3.540.000, dengan pembayaran selama 12 bulan. Jadi setiap bulannya Ibu NML harus

membayar kembali pinjaman tersebut Rp. 295.000,- karena memang pendapatan dari suami tidak menentu sehingga Ibu Nurmala mengajukan proposal kepada Unit Pengelola Keuangan dengan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- setelah diberikan modal dari pinjaman Unit Pengelola Keuangan, modal tersebut Ibu NML gunakan untuk pembelian bahan-bahan untuk berjualan kios kelontong. Dari usaha tersebut ibu NML memperoleh keuntungan rata-rata Rp. 80.000,- per/hari, dari keuntungan tersebut menurut Ibu NML mampu membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Hasil Wawancara Tanggal 4 Juli 2021).

2. Berdasarkan wawancara dengan Ibu RDN selaku ketua SPP kelompok Sabe Meurata 1 yang memiliki usaha menjual ikan (membantu suami). Sebelumnya dalam menjalankan usaha tersebut Ibu RDN menggunakan dana pribadi dengan rata-rata pendapatan Rp. 75.000 per/hari. Kemudian untuk mengembangkan usaha yang memiliki prospek yang baik, Ibu RDN mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp 5.000.000, dengan bunga pengembalian 18%. Pendapatan rata-rata Ibu RDN setelah mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan kini sebesar Rp.100.000 per/hari. Total pinjaman dari bunga 18% tersebut sebesar Rp. 5.900.000, dengan cicilan pembayaran selama 12 bulan. Jadi setiap bulannya Ibu RDN harus membayar kembali pinjaman tersebut Rp. 492.000- (Hasil Wawancara Tanggal 5 Juli 2021)

3. Berdasarkan wawancara dengan Ibu SRY ketua SPP kelompok Sabe Meurata 2 ia mengatakan bahwa, sebelum meminjam di Unit Pengelola Keuangan Ibu SRY mempunyai usaha pembuatan kue basah. Pembuatan kue dilakukan setiap hari dan untuk jenis kue tertentu tergantung dari pesanan (tempahan orang) pada saat ada yang memesan saja, pendapatan awal tiap kali ada yang memesan rata-rata sebesar Rp. 50.000, dalam upaya mengembangkan usahanya lalu Ibu SRY mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp. 2.000.000. Total pinjaman dari bunga 18% tersebut sebesar Rp. 2.360.000, dengan cicilan pembayaran selama 12 bulan. Jadi setiap bulannya Ibu SRY harus membayar kembali pinjaman tersebut Rp.197.000- (Hasil Wawancara Tanggal 5 Juli 2021)

4. Usaha ibu AFR saat ini lebih berkembang, ibu AFR mengajukan pinjaman modal Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp.3.000.000, yang dulunya kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya, namun setelah mendapatkan pinjaman tersebut, kini AFR bukan hanya bisa membuat pesanan saja tetapi mampu menyetok serta membuat kue untuk dijual dan dititipkan diwarung, dari tiap kali pembuatan kue ibu AFR mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 150.000 tiap kali pembuatan (Hasil Wawancara Tanggal 4 Juli 2021).

5. Berdasarkan wawancara dengan Ibu YSI ketua kelompok Meurata 1 ia mengatakan bahwa, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu Y YSI hanya menunggu penghasilan dari suami yang bekerja sebagai pedagang ikan, tetapi terkadang tidak memperoleh ikan dari nelayan untuk dijual kembali, sehingga pendapatan suami pun tidak menentu. Untuk dapat membantu pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Ibu YSI mencoba untuk membuka usaha dagang sayur dan jajanan dengan mengajukan pinjaman modal Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp.3.000.000, dari usaha tersebut pendapatkan serta keuntungan Ibu YSI rata-rata sebesar Rp.70.000, per/hari (Hasil Wawancara Tanggal 4 Juli 2021).

6. Peryataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu AMW anggota peminjam kelompok Bungong Jeumpa, berdasarkan wawancara dengan ibu AMW mengatakan bahwa, dalam kesehariannya ibu menunggu pendapatan suami ibu sebagai buruh pasar sedangkan ibu dirumah, menjaga anak dan menjaga warung gorengan serta makan ringan modal membuka warung tersebut ibu dapatkan dari pinjaman modal UPK yang berjumlah Rp.5.000.000, dari modal pinjaman tersebut ibu mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp.120.000, per/hari pendapatan tersebut dirasa mampu membantu pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya (Hasil Wawancara Tanggal 6 Juli 2021).

7. Berdasakan hasil wawancara dengan Ibu DSM yaitu ketua dari kelompok SPP Sepakat 1, yang memiliki usaha jualan pakaian keliling desa bahkan antar desa. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu DSM salah satu usaha bersama lebih mendalam ia mengatakan bahwa, pinjaman tersebut sebesar Rp.6.000.000, dipergunakan untuk modal usaha tersebut, dari modal tersebut dalam aktivitas penjualan pakaian Ibu DSM mendapatkan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 150.000, tiap kali dilakukan usaha keliling pakaian tersebut (Hasil Wawancara Tanggal 6 Juli 2021).

8. Dan berdasarkan wawancara dengan NRT anggota peminjam kelompok SPP Maju Jaya ia mengatakan bahwa, pinjaman tersebut ia gunakan untuk jualan jajanan (kios) di depan rumahnya. Ibu NRT mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp 3.000.000. Pendapatan rata-rata Ibu NRT setelah mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan kini sebesar Rp.100.000 per/hari. Setiap bulannya Ibu NRT harus membayar kembali pinjaman tersebut Rp. 295.000- (Hasil Wawancara Tanggal 8 Juli 2021)

9. Berdasarkan wawancara dengan Ibu EMN ketua kelompok SPP Melati mengatakan bahwa, memang benar pinjaman Unit Pengelola Keuangan membantu Ibu EMN dengan memberikan modal untuk usaha sebesar Rp.2.000.000, dana tersebut Ibu EMN pakai untuk modal usaha

pembuatan kue kering. Penghasilan yang diperoleh dari setiap pembuatan kue tersebut sebesar Rp.70.000. Pembuatan kue ini dilakukan 3x dalam seminggu dan tergantung permintaan pelanggan.

10. Berdasarakan wawancara dengan Ibu RTN ketua peminjam kelompok SPP Antik ia mengatakan bahwa, dalam penggunaan pinjaman Unit Pengelola Keuangan sebesar Rp.5.000.000, Ibu RTN gunakan untuk usaha kios jajanan dan kelontong. Penghasilan yang diperoleh dari setiap harinya sebesar Rp.150.000 setelah diberikan pinjaman dana oleh UPK. Sebelumnya penghasilan Ibu RTN adalah sebesar Rp.80.000 perhari.

Pada dasarnya tujuan dan maksud diberikanya pinjaman dana bergulir pada UPK adalah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menumbuh kembangkan usaha untuk masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya pinjaman dana bergulir sebagian warga miskin Kecamatan Meureubo terbantu dalam meningkatkan pendapatan. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan, meningkatnya perekonomian, dan pada akhirnya warga miskin Kecamatan Meureubo mampu melepaskan diri dari kemiskinan.

Pengelolaan UPK Kecamatan Meureubo sangat terorganisir dengan baik sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam penginputan data nasabah dan tahu jelas dana yang dipinjam akan dipergunakan untuk apa. Hasil wawancara dengan ketua UPK Kecamatan Meureubo menyebutkan bahwa:

> “Setiap kelompok yang ingin meminjam itu wajib membuat proposal permohonan terus mengusulkan ke pihak UPK (unit pengelola kegiatan) terus didiskusikan oleh tim verifikasi dan diadakan perguliran atas pinjaman tersebut. Dalam pendayagunaan pinjaman yang diberikan kepada nasabah cukup meningkatkan pendapatan masyarakat yang meminjam modal pada UPK Kecamatan Meureubo(Hasil Wawancara Tanggal 30 Juni 2021)

Dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan

kegiatan SPP yang berasal dari dalam kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabirin menyebutkan bahwa:

> "Memang banyak ibu-ibu yang mengajukan pinjaman SPP ke UPK, tetapi pinjaman disebutkan bahwa ingin memulai usaha atau menambah modal usaha tetapi pada implementasinya berbeda. Kenyataan seperti ini tidak asing lagi bagi kami. Karena kami hanya menyalurkan dana atau modal usaha kepada masyarakat, dan itu sudah kami laksanakan. Tinggal masyarakatnya saja mau dipergunakan bagaimana dana yang sudah diberikan. Yang penting dana yang kami salurkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membuatnya sejahtera walaupun penggunaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Semoga untuk pinjaman-pinjaman berikutnya dapat menyadarkan masyarakat bahwa memulai usaha lebih baik dari pada hanya jadi konsumen saja" (Hasil Wawancara Tanggal 30 Juni 2021)

Selain itu hasil wawancara bersama staff UPK, yaitu Ibu Miftah juga menyebutkan bahwa terdapat faktor penghambat lainnya yaitu

> "Hambatan dalam pengajuan tidak ada, karena setelah mereka mengajukan proposal, tunggu beberapa hari duitnya langsung cair. Setelah uang SPP cair, banyak ibu-ibu yang menggunakan uang SPP hanya untuk keperluan konsumtif saja. Mereka menggunakan dana ini untuk memperbaiki rumah, bayar sekolah anak, dan keperluan rumah tangga lainnya. Untuk angsuran bulanan mereka hanya mengandalkan pada pengahasilan suami". (Hasil Wawancara Tanggal 1 Juli 2021)

Selain itu terdapat pula beberapa faktor penghambat yang cukup dominan yaitu keterlambatan pembayaran kembali modal oleh para nasabah, hal ini dilandasi dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada petugas Ibu Sartika Musfira selaku staff UPK yang menyatakan bahwa:

> "Hambatan dalam pinjaman bergulir itu sendiri misalkan dalam pembayararan dana tersebut melakukan tunggakan atau macet dalam membayar perbulannya itu yang meyebabkan hambatan yang terbesar saat ini". (Hasil Wawancara Tanggal 1 Juli 2021)

Dalam sebuah usaha tidak pernah lepas dari faktor hambatan dalam usaha namun faktor hambatan tersebut selalu memiliki solusi dalam permasalahan yang timbul. Pihak UPK Kecamatan Meureubo memiliki cara dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dalam peminjaman modal. Hasil wawancara yang dilakukan dengan staff UPK yaitu:

> "Cara mengatasinya itu dengar cara tidak memberikan pinjaman baru lagi pada kelompok yang nonggak membayar dan tidak hanya kelompok tersebut yang terkena sanksi tetapi satu desa tersebut tidak dapat meminjam dana tersebut sebelum pembayaran terselesaikan" (Hasil Wawancara Tanggal 1 Juli 2021)

4.3 Pembahasan

Keuangan inklusi yang dijalankan di Kecamatan Meureubo melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Meureubo memiliki peran yang tidak kecil dalam rangka mewujudkan visi nasional keuangan inklusi untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak lain karena karakteristik UPK yang mampu menjangkau elemen masyarakat miskin dan marjinal yang *non bankable*, yang selama ini sulit dijangkau oleh beberapa lembaga keuangan.

Disamping itu, UPK ini mampu menjadi skema nyata dari intensitas jasa keuangan inklusi yang bertujuan untuk mengatasi situasi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang dimaksud disini, yaitu:

1. Menjadikan keuangan inklusi sebagai satu usaha untuk membuka eksklusivitas lembaga keuangan yang pada umumnya hanya memberi permodalan kepada pihak-pihak yang dianggap *bankable*.

2. Menetapkan niat dalam menjalankan keuangan inklusi, yaitu niat kesediaan untuk memasukkan pihak non *bankable* yang selama ini dieksklusi atau dipinggirkan dari lembaga keuangan untuk dikategorikan kembali sebagai pihak yang layak dan patut mendapatkan berbagai jasa layanan keuangan.

Implikasi keuangan inklusi di Kecamatan Meureubo menunjukkan pergerakan hasil yang positif. Hal ini berkaitan dengan penuturan para nasabah-nasabah UPKyang menerima pemodalan ini, bahwa sebagian besar dari mereka telah merasakan manfaat dan perubahan kondisi perekonomian. Bagi yang sebelumnya sudah memiliki usaha, mereka merasakan ada peningkatan pendapatan, dan bagi yang memulai usaha baru, mereka merasakan ada peningkatan kemampuan ekonomi, meskipun tidak terlalu signifikan.

Program pembiayaan UPK dalam rangka menciptakan keuangan inklusi untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Meureubo telah berimplikasi positif menciptakan pemberdayaan masyarakat miskin yang signifikan. Implikasi yang positif ditunjukkan oleh kemampuan program UPK Kecamatan Meureubo ini dalam menciptakan kondisi masyarakat atau individu yang lebih berdaya dari pada kondisi yang mereka alami sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme finansial inklusi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin (Studi Kasus Pembiayaan Unit Pengelola Kegiatan Tahun 2020) di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat melalui 5 tahapan, yaitu tahap pengajuan pinjaman, pemeriksaan, pencairan, monitoring/ pembinaan dan pembayaran kembali.
2. Keuangan inklusi di Kecamatan Meureubo diimplementasikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK. Program ini mengupayakan kemudahan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat miskin dengan memberikan pinjaman modal usaha.
3. Implikasi keuangan inklusi untuk pemberdayaan masyarakat melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK di Kecamatan Meureubo menunjukkan pergerakan nilai yang positif. Sebagian besar masyarakat miskin yang menerima bantuan, telah merasakan manfaat dan perubahan kondisi perekonomian. Bagi yang sebelumnya sudah memiliki usaha, mereka merasakan ada peningkatan pendapatan, dan bagi yang memulai usaha baru, mereka merasakan ada peningkatan kemampuan ekonomi, meskipun tidak terlalu signifikan.

5.2 Saran

1. UPK Kecamatan Meureubo perlu memberikan pelatihan secara khusus tentang ekonomi terkait pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serata meningkatkan upaya pendampingan secara intensif kepada para masyarakat miskin**,** sehingga mereka dapat meningkatkan skala ekonominya secara signifikan dan memiliki usaha yang berkelanjutan yang menciptakan kemandirian bagi mereka.
2. Perlunya meningkatkan kinerja porgram Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Meureubo melalui upaya peningkatan SDM pengelola dan memperluas kerjasama dengan lembaga ekonomi atau sosial yang lain untuk memperkuat basis ekonomi atau sosial yang telah ada serta dapat menambah alokasi dana di UPK untuk keberlanjutan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sehingga potensi bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin melalui keuangan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. 2010. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo

Ahmadi, H. 2018. *Analisis Penerapan Brilink di Bank BRI Kota Madiun Sebagai Upaya Men-dorong Financial Inclusion*. Inventory. Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No.2. Madiun: Universitas PGRI Madiun

Aristo. 2014. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung

Aziz dkk. 2011. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : Bina Grafika

Badan Pusat Statistik. 2019. *Pertumbuhan Ekonnomi dan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Tahun 2014-2019*. BPS Indonesia.

Burhan, Bungin. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fahrudin, M. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Financien, E. 2018. *Efektifitas Pinjaman Bergulir Pada Unit Pengelola Keuangan-Kelompok Swadaya Masyarakat (UPK-KSM) Margodadi Jaya Kelurahan Margodadi Kota Metro Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah*. Skripsi. Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Julius, R. Latumaerissa. 2012. *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardikanto. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas

Mardani, D. A. 2018. *Peran perbankan syariah dalam me-ngimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia*. al-Afkar, Journal for Islamic Studies. E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883. Bandung: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya

Mirza, Bachtiar. H. 2014. *Membangun Keuangan Inklusif*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Vol 23, no 2.

Moleong. J.L. 2014. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muljawan, Dadang, 2013. *Islamic Financial Safety-net dan Kesejahteraan Masyarakat*, Dalam Jurnal Ekonomi Islam Republika "IQTISHODIA", Republika.

Nasution, H. 2019. *Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro SS II di Bank Sumut Syariah).* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. ISSN : 2502-1397 E-ISSN : 2540-8100. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nikie, C. 2012. *The State and Sosial Policy*. Bassingstoke: Macmillan.

Ningrum, D.K. 2018. *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan di Jawa Timur Periode Tahun 2011-2015.* Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya.

Okoye, Dkk. 2017. *Financial inclusion as strategy for enhanced economic growt and development*. Journal of Interest Banking and Commerce. 22 (S8).

Purba, M.F. 2016. *Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014.* Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Purnomo, A.D. 2015. *Analisis Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kecamatan Semanu Gunungkidul*. Skripsi: Jurusan Pendidikan Ekonom. Fakultas Ekonom: Universitas Negeri Yogyakarta.

Sadli, Mohammad. 2014. *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sarma, Mandira. 2012. *Index of Financial Inclusion : A measure of financial sector inclusiveness.* Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No.07/2012.

Siamat, Dahlan. 2014. *Manajemen Lembaga Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Slamet, D. 2014. *Pengantar Sosiologi Ekonomi. Edisi ke 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soetrisno, L. 2013. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*.Yogyakarta: Kanisus.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masayrakat Memberdayakan rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sumodiningrat, Gunawan. 2011. *Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: UGM.

Susilo, dkk. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.

Todaro, Micheal. 2013. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, alih bahasa Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.

Tanuwidjaja. 2014. *8 Intisari Kecerdasan Finansial.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Ummah, Nuryartono, Anggraeni. 2015. *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembanguan.* Program Studi Ilmu Ekonomi. Bogor: IPB.

Usman, M. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.

Utami dan Muslikhah. 2019. *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2012-2017*. Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's. Jakarta: Politeknik Statistika STIS.

Yaqin, M. 2019. *Studi Inklusi Keuangan Terhadap Dinamika Pertumbuhan Ekonomi di Asean 4*. Skripsi. Fakultas Ekonomik. Jember: Universitas Jember.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Kepala UPK Kecamatan Meureubo

1. Dari manakah program UPK berasal?
2. Sejak kapan program UPK masuk ke Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
3. Sejak kapan programUPK masuk ke Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
4. Berapa jumlah dana yang diterima oleh UPK Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
5. Bagaimana ketentuan peminjamannya?
6. Bagaimana tahap pengajuan peminjamannya?
7. Bagaimana pembagian hasilnya?
8. Apa sanksi yang diberikan kepada UPK Kecamatan Meureubo jika terjadi kredit macet?
9. Apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program tersebut?
10. Apa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program dana bergulir pada UPK Kecamatan Meureubo?
11. Bagaimana cara penyelesaian kendala yang dihadapi tersebut ?

B. Staf UPK Kecamatan Meureubo

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman bergulir di UPK Kecamatan Meureubo?
2. Wilayah mana saja yang di prioritaskan oleh UPK Kecamatan Meureubo?
3. Bagaimana pengelolaan pinjaman bergulir di UPK Kecamatan Meureubo?
4. Bagaimana pemberdayaan dana pinjaman bergulir di UPK Kecamatan Meureubo?
5. Bagaimana pola pendayagunaan dana pinjaman bergulir di UPK Kecamatan Meureubo?
6. Sistem apa yang diterapkan dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir di UPK Kecamatan Meureubo?
7. Bagaimana konstribusi pinjaman bergulir di UPK Kecamatan Meureubo bagi perkembangan ekonomi di Kecamatan Meureubo?
8. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui pinjaman bergulir UPK di Kecamatan Meureubo?
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan pelaksanaan pemberdayaan ekonomimelalui pinjaman bergulir UPK di Kecamatan Meureubo?
10. Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat melalui pinjaman bergulir UPK di Kecamatan Meureubo?

C. Nasabah UPK Kecamatan Meureubo

1. Bagaimana konstribusi pinjaman bergulir UPK di Kecamatan Meureubo?
2. Apakah sistem pinjaman bergulir UPK di Kecamatan Meureubo sudah baik dan apa kekurangannya?
3. Bagaimana pendampingan usaha yang dilakukan UPK di Kecamatan Meureubo?
4. Bagaimana konstribusi UPK di Kecamatan Meureubo dalam memfasilitasi kebutuhan nasabah?
5. Apakah ada perbedaan peningkatan pendapatan sejak mendapat pinjaman bergulir UPK di Kecamatan Meureubo?

Lampiran 2

DOKUMENTASI UPK

KARTU PINJAMAN ANGGOTA
KELOMPOK ANTIK
GAMPONG UJONG DRIEN KEC. MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT

KARTU IURAN ANGGOTA

Nama : ASMAWATI
Desa : Ujong Drien
Kecamatan : Meureubo
Jumlah Pinjaman : Rp. 2.000.000,-

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Setoran Pokok	Simpanan Wajib	Jumlah Setoran			Paraf
					Setoran 1	Setoran 2	Setoran 3	
1.	2020	Agustus	197.000	10.000	207.000			
2.	2020	September	197.000	10.000	207.000			
3.	2020	Oktober	197.000	10.000	207.000			
4.	2020	November	197.000	10.000	207.000			
5.	2020	Desember	197.000	10.000	207.000			
6.	2021	Januari	197.000	10.000	207.000			
7.	2021	Februari	197.000	10.000	150.000,-			
8.	2021	Maret	197.000	10.000	207.000,-			
9.	2021	April	197.000	10.000	207.000,-			
10.	2021	Mei	197.000	10.000	207.000,-			
11.	2021	Juni	197.000	10.000	207.000			
12.	2021	Juli	197.000	10.000				

Ujong Drien, 3 Agustus 2020

PENGURUS KELOMPOK ANTIK

Ketua, Bendahara,

RUSTINA ERMIANA

Contoh Kartu Pinjaman Anggota

UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
SEJAHTERA BERSAMA SYARIAH
KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

NO. 3207

BUKTI SETORAN SPP

- NOMOR BUKTI
- NAMA PENYETOR
- NAMA KELOMPOK
- ALAMAT
- ANGSURAN KE

POKOK Rp.
JASA Rp.
TOTAL Rp.

TERBILANG :

Meureubo, ...20..

Yang Menerima (.....)

Nama Penyetor (.....)

Slip Iuran Bulanan Kelompok UPK

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1: Mewawancarai Kepala UPK Kecamatan Meureubo

Foto 2: Mewawancarai Staff UPK Kecamatan Meureubo

Foto 3: Mewawancarai Anggota Kelompok SPP UPK Kecamatan Meureubo

Foto 4: Mewawancarai Anggota Kelompok SPP UPK Kecamatan Meureubo

Foto 5: Mewawancarai Anggota Kelompok SPP UPK Kecamatan Meureubo

Foto 6: Mewawancarai Anggota Kelompok SPP UPK Kecamatan Meureubo